

Katalog/Catalog: 9102067.12



Potensi
**USAHA
MIKRO
KECIL**

PROVINSI SUMATERA UTARA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

<https://sumut.bps.go.id>

Potensi
**USAHA
MIKRO
KECIL**
PROVINSI SUMATERA UTARA



Kata Pengantar

Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja UMK dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi Pemerintah Daerah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat dan lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Medan, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara

Syech Suhaimi



POTENSI USAHA MIKRO KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA SENSUS EKONOMI 2016

No. ISBN: 978-602-331-071-5
No. Publikasi: 12550.1813
No. Katalog: 9102067.12

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm
Jumlah Halaman: vi + 34 halaman

Naskah: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Desain Kover oleh: Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

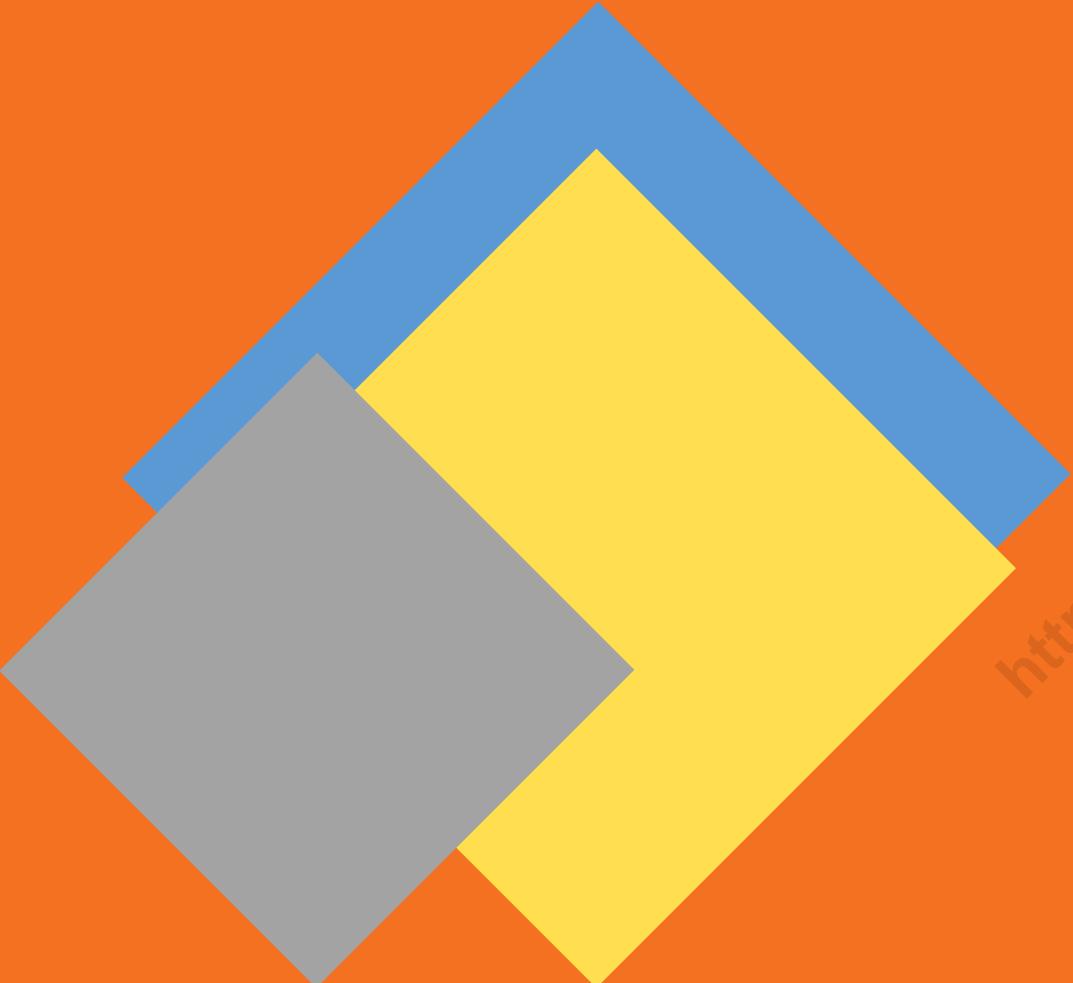
Tata Letak: Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI INDONESIA	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	11
PELAKU UMK MAYORITAS PERORANGAN	17
AKSEBILITAS PERMODALAN UMK	21
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	25
PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG	31



Pendahuluan

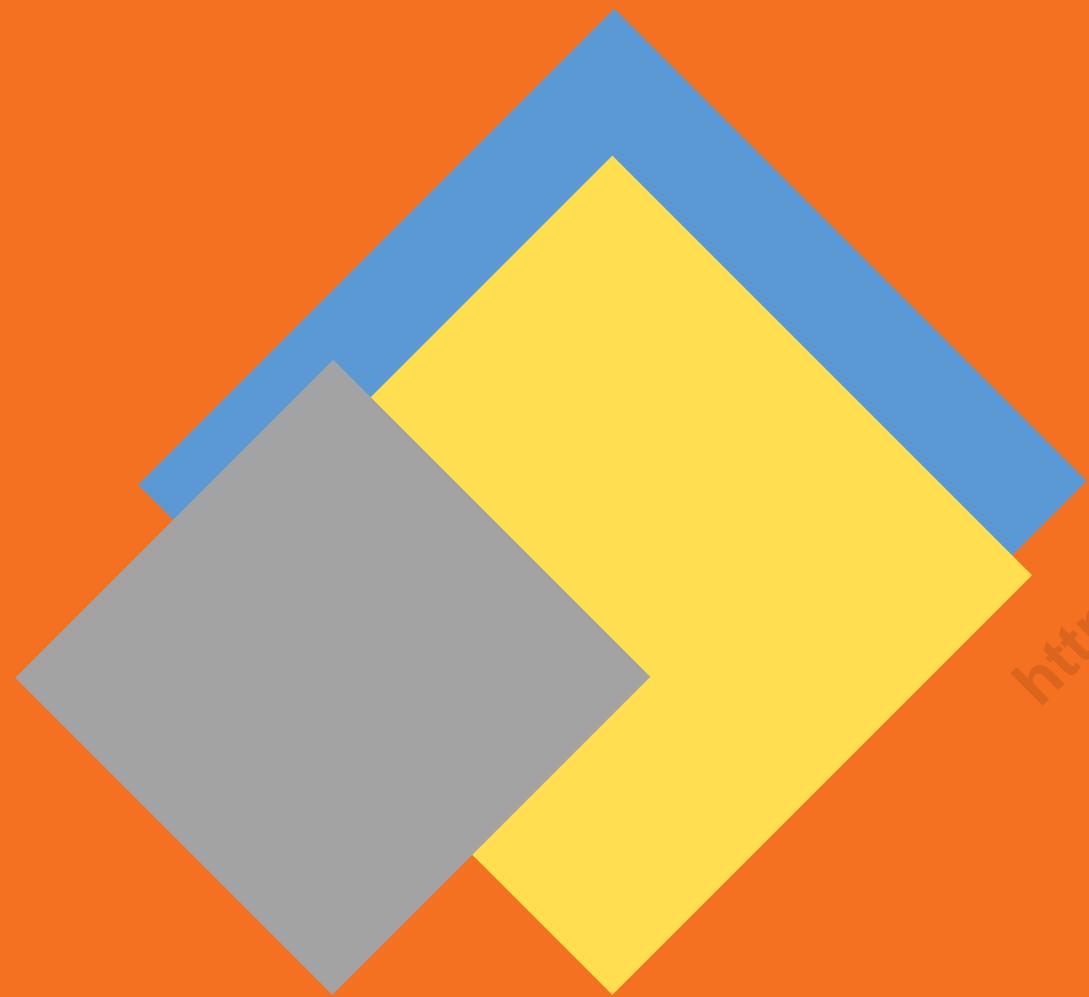
Dunia usaha di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini sebanyak 1,15 juta usaha atau 98,87 persen dari total usaha nonpertanian di Sumatera Utara. Usaha UMK mampu menyerap tenaga kerja sekitar 2,64 juta orang atau sekitar 82,02 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan tingkat pendidikan pelaku usaha yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Sumatera Utara, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



<https://sumut.bps.go.id>

UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI INDONESIA



Bagian

1

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Sumatera Utara. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai *basic* pembangunan ekonomi kerakyatan.

Persentase UMK di Provinsi Sumatera Utara mencapai 98,87 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang tercatat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Jumlah usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sebanyak 547,87 ribu usaha atau mencapai 47,49 persen. Diikuti usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) yang memiliki kontribusi besar, masing-masing 20,18 persen dan 10,81 persen.

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Medan menjadi pusat bisnis dan ekonomi di Sumatera Utara. Dari 33 kabupaten/kota, jumlah UMK di Kota Medan mencapai 19,48 persen. Diikuti Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat dengan jumlah UMK masing-masing 11,65 persen dan 7,95 persen.

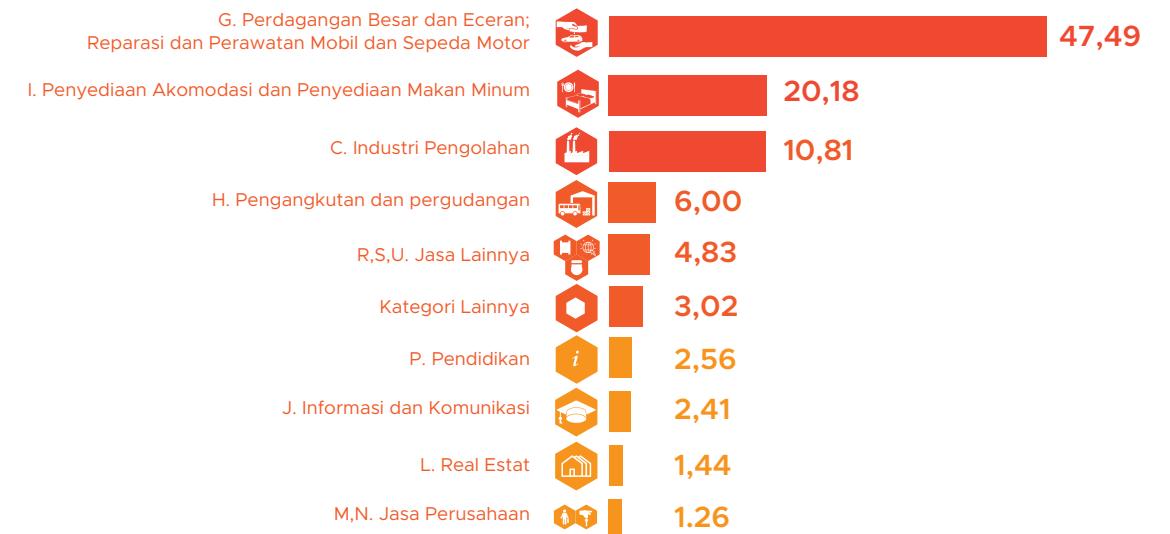
UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
INDONESIA

Gambar 1.1.
Persentase Usaha/Perusahaan Nonpertanian Menurut Skala Usaha, 2017



Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

Gambar 1.2.
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase UMK terbanyak menurut Kabupaten/Kota, 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Medan	224 713	19,48
Deli Serdang	134 386	11,65
Langkat	91 692	7,95
Asahan	66 638	5,78
Simalungun	63 950	5,54
Serdang Bedagai	62 401	5,41
Mandailing Natal	36 788	3,19
Labuhan Batu	35 861	3,11
Batu Bara	33 411	2,90
Pematangsiantar	27 414	2,38
Total	1 153 758	100,00



UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK

Bagian

2

Jumlah UMK yang sangat besar sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas kondisi Agustus 2017, pengangguran di Sumatera Utara mencapai 5,60 persen, terbanyak pada lulusan pendidikan SMK yang mencapai 8,90 persen. Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Indonesia, salah satu disebabkan rendahnya keahlian soft skill khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji.

Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 2,64 juta atau sekitar 82 persen tenaga kerja nonpertanian di Sumatera Utara.

Penyerapan tenaga kerja UMK paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) lebih dari 1,05 juta jiwa atau mencapai hampir 40 persen dari tenaga kerja

pada UMK. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan Usaha Pendidikan (Kategori P) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK. Secara-rata-rata per usaha, usaha Konstruksi (Kategori F) dan Pendidikan (Kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi, masing-masing sekitar 12 dan 11 pekerja per usaha. Secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Sumatera Utara hanya sebesar 2 pekerja.



Gambar 2.1. Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara menurut Pendidikan, 2017 (%)



Gambar 2.2. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Skala Usaha, 2017



Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.3.
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

Tabel 2.
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori, 2016

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
C. Industri Pengolahan	3.471	303.961	2
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	547.877	1.046.251	2
F. Konstruksi	8.483	99.385	12
H. Pengangkutan dan Pergudangan	69.244	88.653	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	232.855	482.199	2
J. Informasi dan Komunikasi	27.773	46.887	2
L. Real Estat	16.649	21.195	1
K. Aktifitas Keuangan dan Asuransi	2.962	15.088	5
P. Pendidikan	29.529	316.507	11
R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	6.563	20.151	3

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

Bagian

3

<https://sumut.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

Penerapan tenaga kerja UMK yang besar di Indonesia memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK.

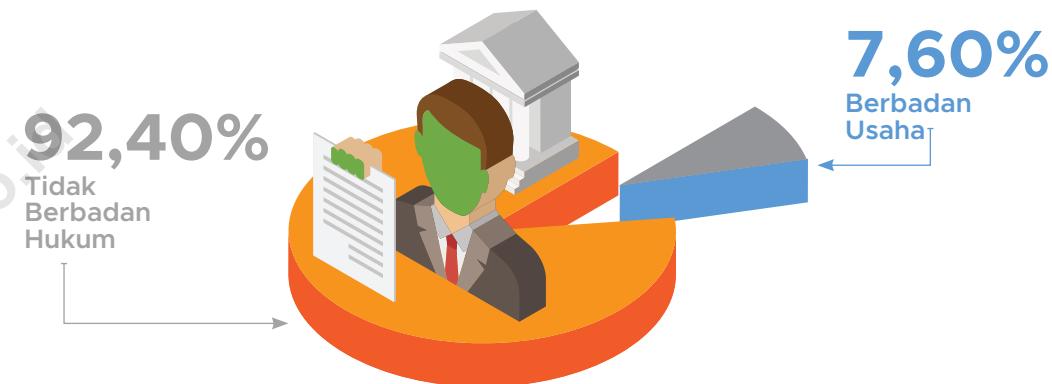
Data SE2016 lanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana, tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer serta internet. Di Sumatera Utara, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat besar yaitu 92,40 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, tetapi juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, hanya sekitar 7 persen pelaku UMK yang memanfaatkan internet dalam usahanya, sementara hanya 5,73 persen yang menggunakan komputer.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK

sekali meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 5,80 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

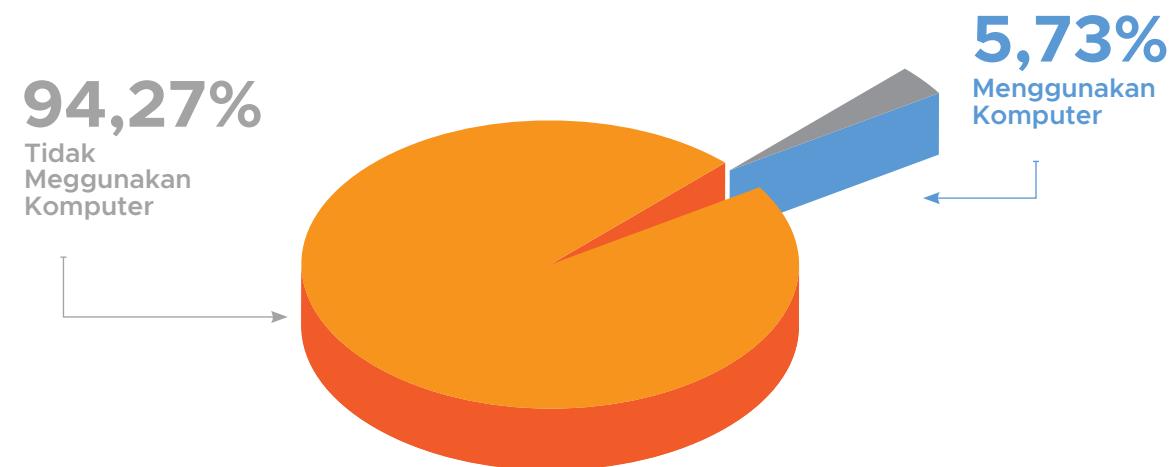
Di antara sektor nonpertanian di Sumatera Utara, UMK pada kegiatan Pendidikan (Kategori P), Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis (Kategori M) dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi (Kategori K) yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari persentase variabel-variabel seperti status badan hukum, penggunaan komputer, pemanfaatan internet dan kemitraan yang relatif tinggi dibandingkan kategori lainnya.

Gambar 3.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Usaha, 2017



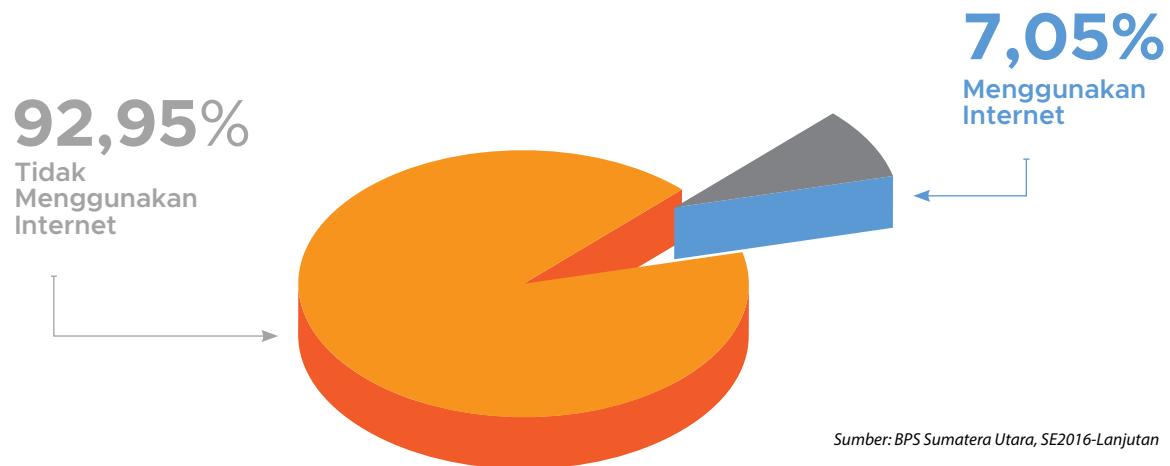
Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2017



Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2017



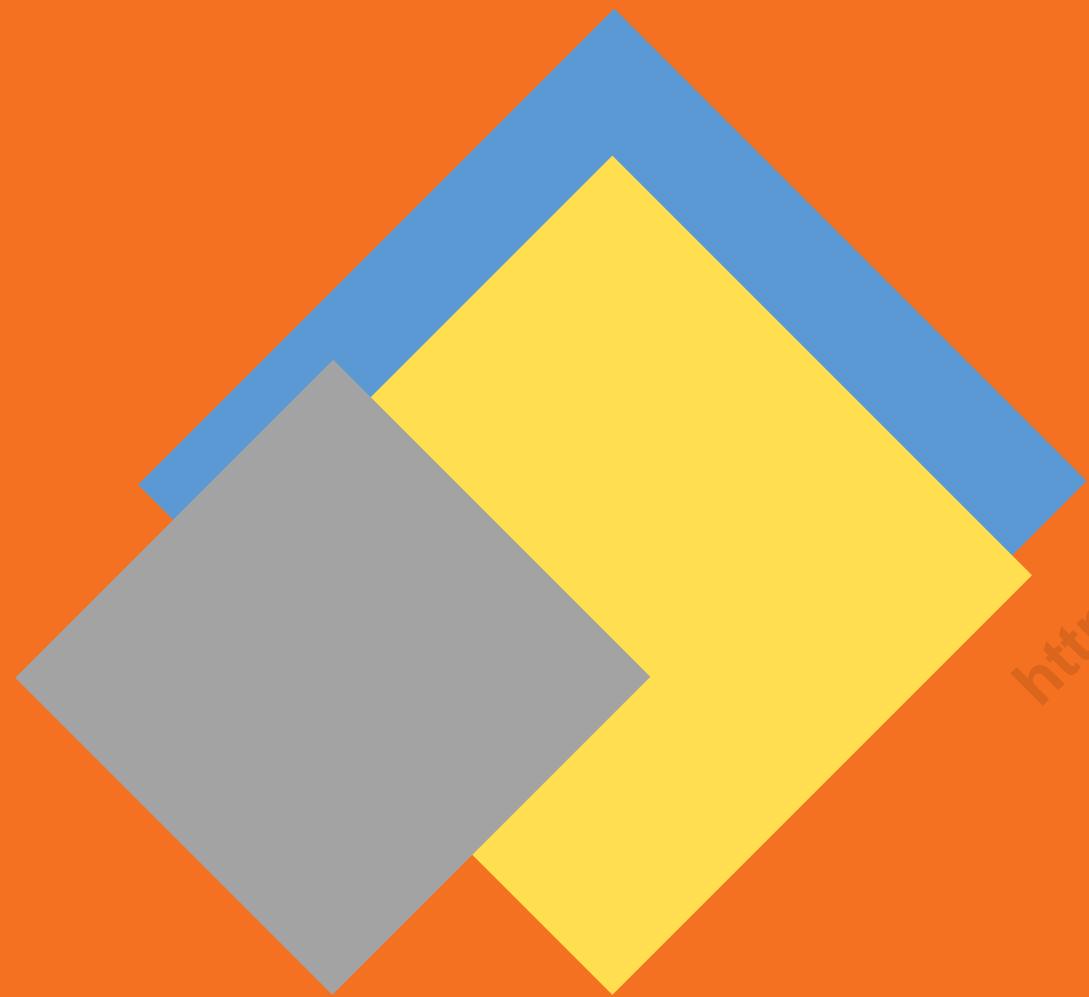
Gambar 3.4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2017



Tabel 3.
Persentase UMK yang Berbadan Hukum, Mempunyai Laporan Keuangan, Menggunakan Komputer, dan Menjalinkan Kemitraan, 2017

Kategori	Berbadan Hukum	Mempunyai Laporan Keuangan	Menggunakan Komputer	Menjalinkan Kemitraan
B,D,E, Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	11,74	80,78	77,23	42,72
C, Industri Pengolahan	6,85	3,18	5,48	7,17
F, Konstruksi	14,75	12,9	13,28	14,42
G, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,25	2,59	4,37	6,63
H, Pengangkutan dan Pergudangan	3,99	1,58	2,66	2,88
I, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,9	1,15	2,66	1,99
J, Informasi dan Komunikasi	5,66	35,49	39,12	10,04
K, Aktivitas Keuangan dan Asuransi	62,85	48,6	30,56	13,75
L, Real Estat	1,62	1,41	3,23	0,28
M,N, Jasa perusahaan	58,5	111,19	88,49	30,11
P, Pendidikan	78,84	63,59	52,22	13,53
Q, Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	64,61	17,73	18,17	14,61
R,S, Jasa Lainnya	12,36	18,23	22,03	7,04
Total	7,60	5,73	7,05	5,80





<https://sumut.bps.go.id>

**PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN**



Bagian

4

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK relatif masih rendah. Masih ada sekitar 46,18 persen pelaku UMK memiliki pendidikan SMP sederajat kebawah. Sedangkan tamatan SLTA (SMA/MA/SMK) sekitar 43,65 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan pendampingan seperti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan produktifitas dan pemasaran. Sementara pelaku usaha yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi DI/II/III hanya 2,82 persen. Diploma DIV/S1 sekitar 6,70 persen, sedangkan S2/S3 hanya 0,66 persen.

Menurut kategori, kegiatan Pertambangan dan Penggalian (Kategori B) merupakan pelaku UMK dengan tingkat pendidikan SMP dan sederajat kebawah terbanyak yakni hampir mencapai 80 persen. Diikuti kegiatan Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Daur Ulang Sampah (Kategori E) yang sebanyak 68,91 persen. Berbanding terbalik dengan kegiatan Pendidikan (Kategori P) yang hanya 4,64 persen.

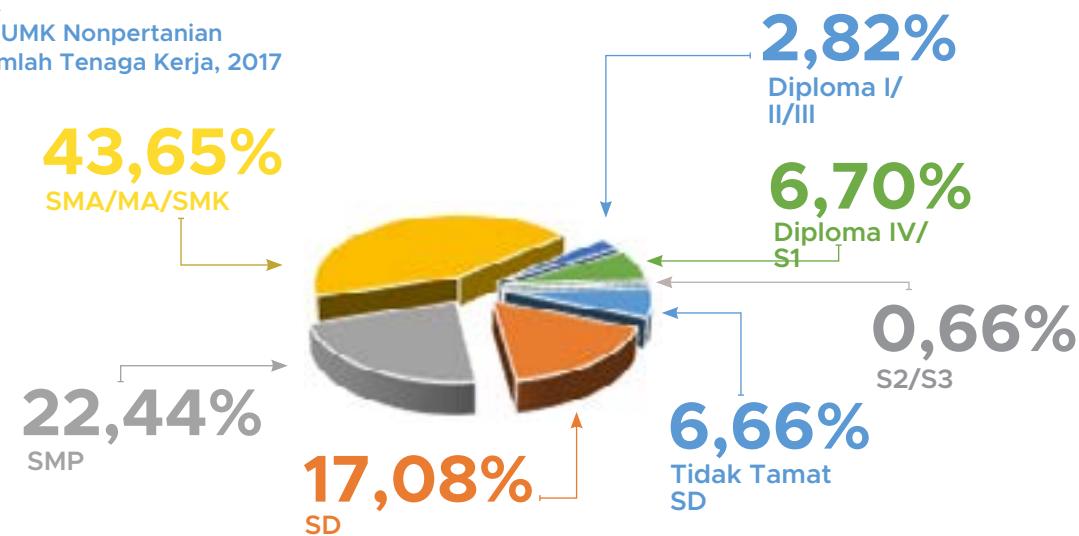
Pengaruh gender mempunyai peranan dalam menggerakkan UMK. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 43 persen. Meskipun masih rendah dibandingkan dengan laki-laki, namun persentase ini dianggap cukup

tinggi mengingat masih berlakunya norma bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga. Berpijak dengan hal tersebut maka dapat diduga bahwa UMK merupakan penunjang perekonomian keluarga.

Menurut kategori, kegiatan Kesehatan (Kategori Q) di dominasi oleh perempuan dengan persentase hampir mencapai 73 persen, diikuti Pendidikan (Kategori Q) sekitar 54,80 persen. Sedangkan kegiatan Pengangkutan dan pergudangan (Kategori H) hanya 1,23 persen yang digeluti oleh pelaku usaha kaum perempuan.

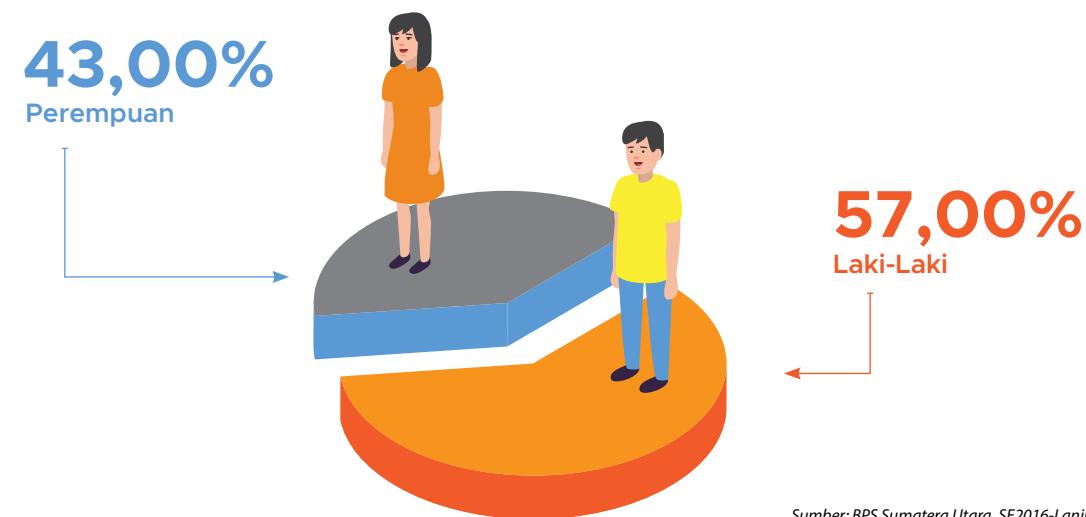
PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN

Gambar 4.1. Persentase UMK Nonpertanian Menurut Jumlah Tenaga Kerja, 2017



Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.2. Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.3.
Persentase Pengusaha Perempuan UMK Nonpertanian Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

AKSEBILITAS PERMODALAN UMK

Bagian

5

AKSEBILITAS PERMODALAN UMK

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Seperti diketahui jumlah UMK mendominasi jumlah usaha di Sumatera Utara. Dengan kapasitas usaha yang relatif kecil, permodalan usaha ini masih banyak menggunakan modal sendiri. Sekitar 92,51 persen modal pelaku UMK berasal dari milik sendiri. Hanya 4,93 persen yang berasal dari pihak Bank.

Permodalan kerap kali menjadi kendala dalam menjalankan bisnis. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting. Pelaku UMK yang memiliki akses modal baik dari Bank maupun Non Bank sangat kecil sekali, tidak sampai 1 persen. Beberapa alasan yang menyebabkan UMK tidak menjadikan bank dan nonbank sebagai sumber pemberi modal utamanya adalah karena alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, prosedur sulit serta tidak tahu prosedur.

Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis bantuan kredit yang meringankan. Bank Indonesia juga telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan bantuan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015).

Keberadaan koperasi ikut berperan dalam mendekatkan UMK untuk mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan. UMK yang menjadi anggota koperasi memiliki peluang 5,972 kali lebih besar untuk mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan dibandingkan bukan anggota koperasi.

Skala usaha kecil memiliki peluang 2,133 kali lebih besar untuk mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan dibandingkan skala usaha mikro. UMK yang menjalin kemitraan juga lebih mudah mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan. Tujuan kemitraan adalah memberikan pembinaan bantuan bagi UMKM dari perusahaan besar, termasuk dalam hal ini adalah permodalan. Dengan demikian, peluang untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan 1,994 kali lebih besar pada UMK yang menjalin kemitraan.

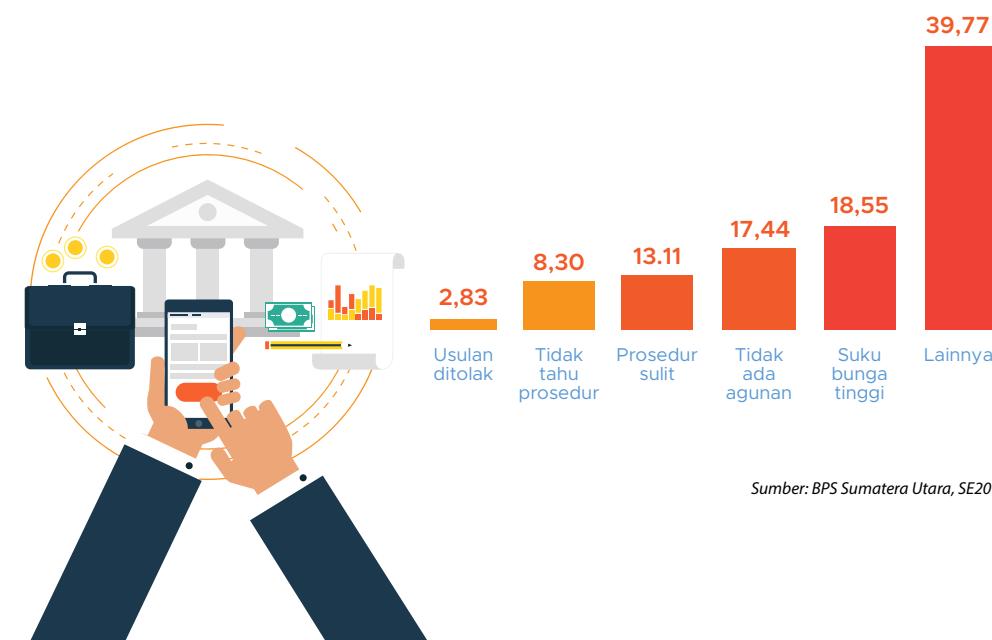
Penggunaan Internet dalam menjalankan usaha, bermanfaat untuk sarana promosi produk, sumber informasi dan memudahkan komunikasi. Dengan keunggulan tersebut pelaku usaha UMK memiliki peluang 1,516 kali lebih besar untuk mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan dibandingkan usaha yang tidak menggunakan internet.

Gambar 5.1. Persentase UMK Menurut Memiliki Akses Modal ke Bank dan Non Bank, 2017



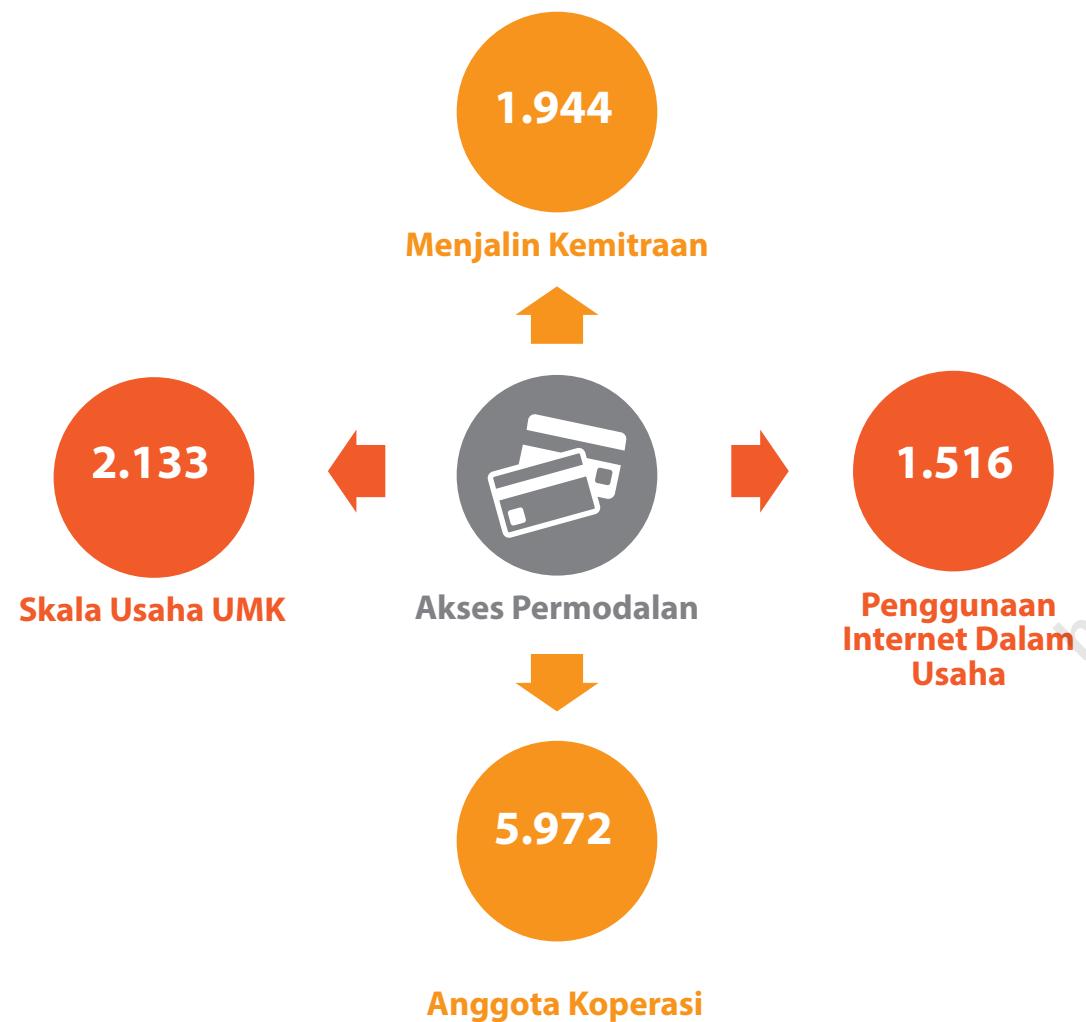
Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2. Persentase UMK yang Tidak Mempunyai Akses ke Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Menurut Alasannya (persen), 2017



Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.3.
Faktor yang Mempengaruhi Akses Kredit Perbankan



KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

Bagian

6

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

Gambar 6.1.
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015

Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba UMK menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Sekitar 17,90 persen UMK di Sumatera Utara menyatakan bahwa perolehan laba usaha di tahun 2016 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Sebanyak 40,23 persen menyatakan laba usahanya tetap.

Berdasarkan skala usaha, pelaku usaha kecil memiliki perolehan laba usaha lebih baik dibandingkan dengan mikro. Sebagai perbandingan sebanyak 25,77 persen laba usaha skala kecil meningkat, sedangkan skala mikro hanya 17,08 persen. Sementara untuk laba usaha yang menurun, usaha skala kecil sebesar 29,92 persen sedangkan skala mikro 33,48 persen.

Selain laba usaha, rasio cost to income juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha, maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada gambar 6.2 UMK pada Real Estat (Kategori L) merupakan kategori yang

paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,29. Kategori L mampu mendulang pendapatan hampir tiga setengah kali lipat dari biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) dengan rasio sebesar 0,33. Total rata-rata cost to income UMK sebesar 0,56.

33,14
Menurun

40,23
Tetap

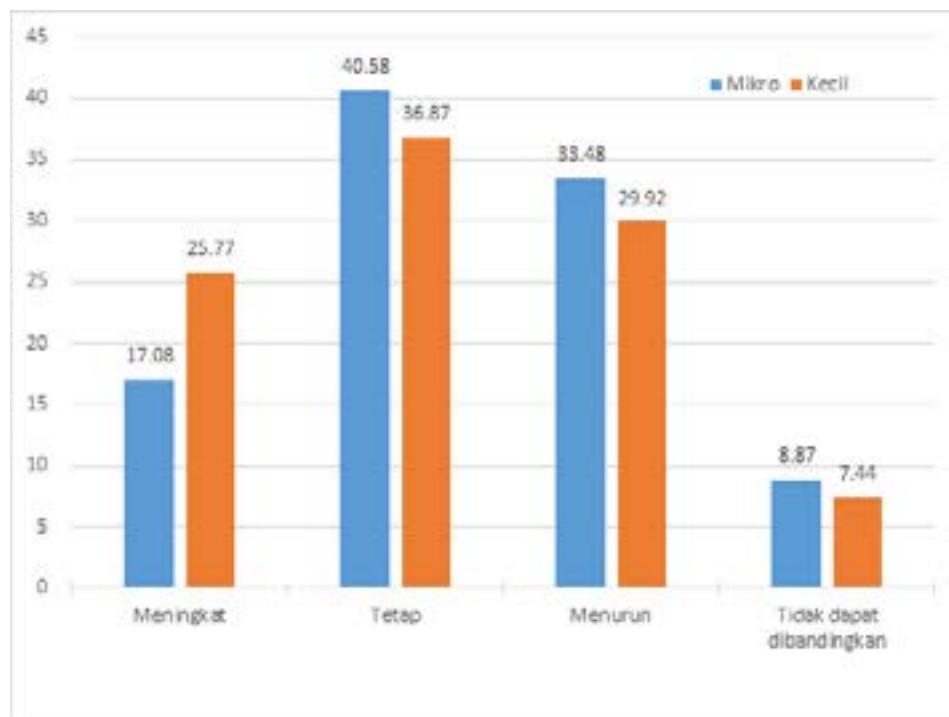
8,74
Tidak Dapat
Dibandingkan

17,90
Meningkat

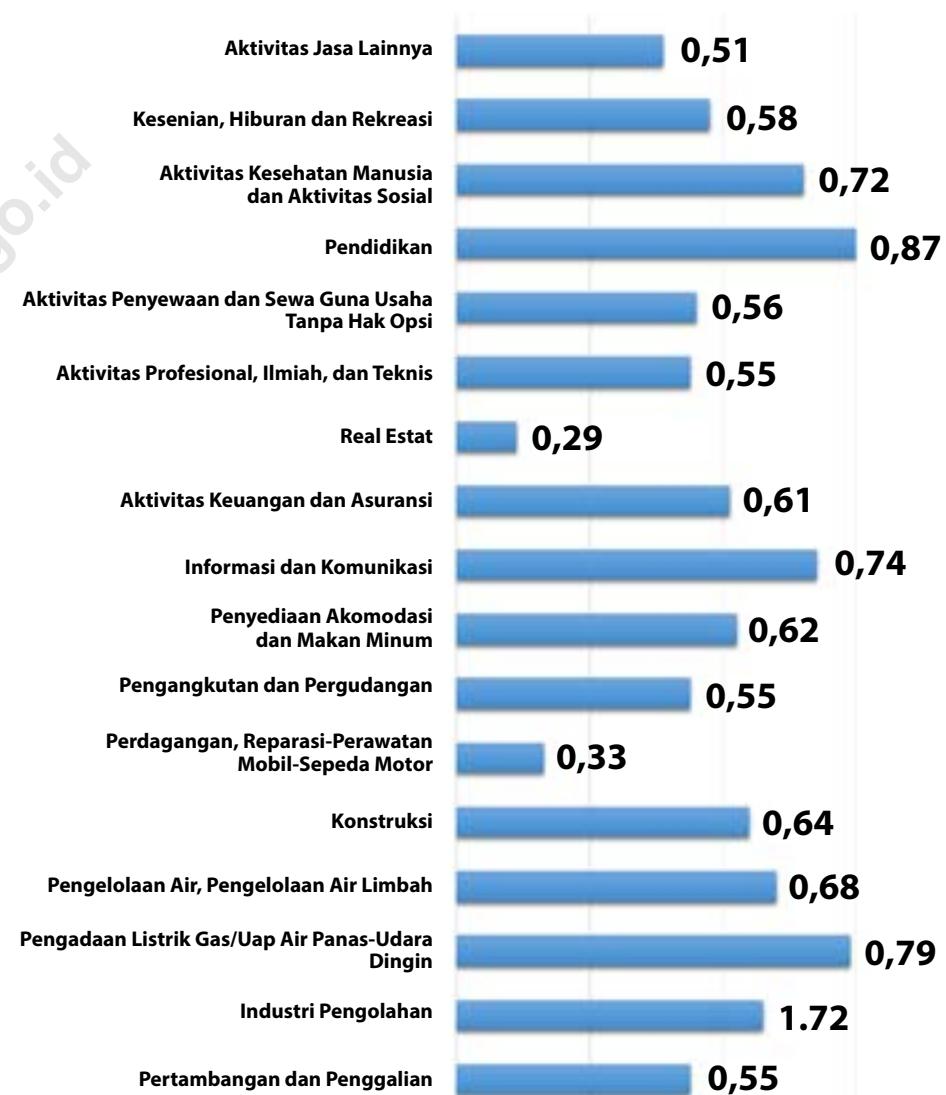


<https://sumut.bps.go.id>

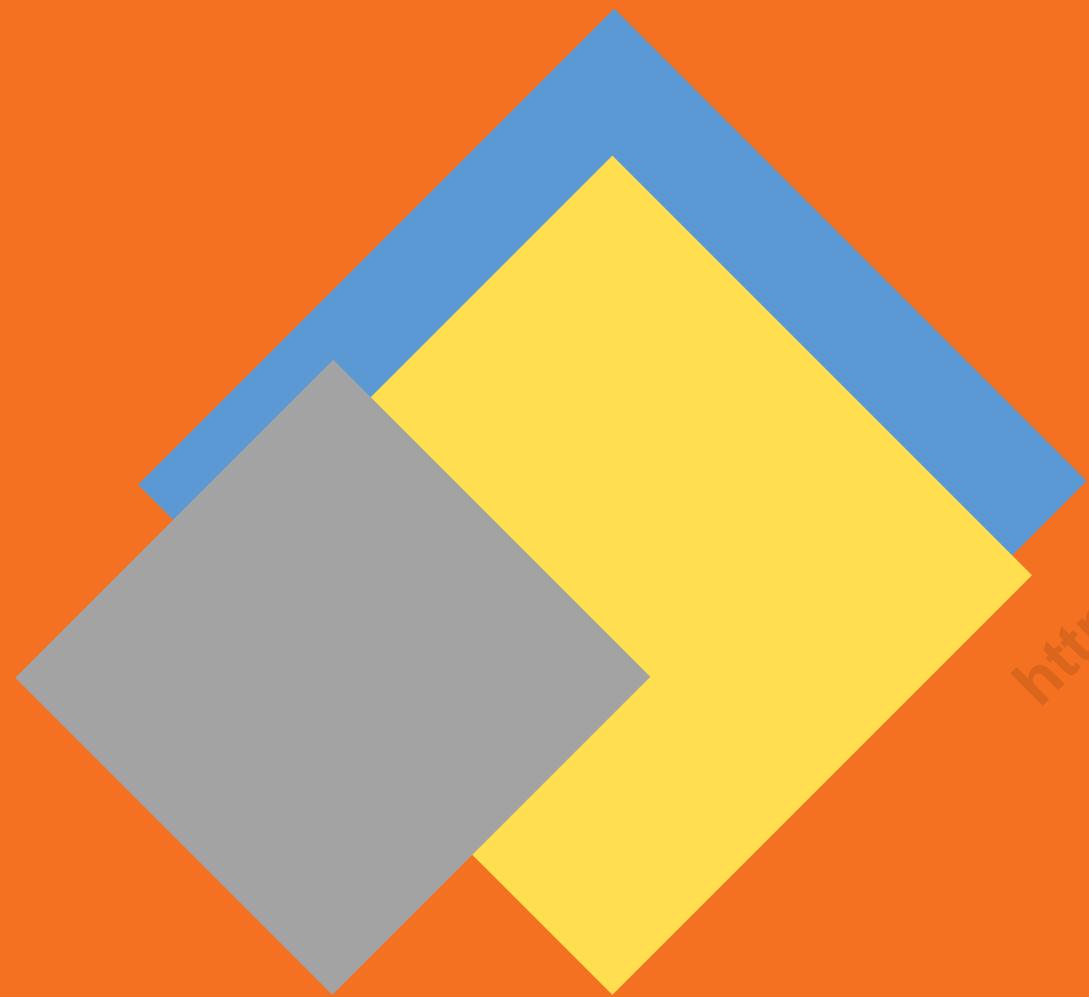
Gambar 6.2.
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Gambar 6.3.
Rasio Pendapatan UMK terhadap pengeluaran menurut Lapangan Usaha, 2017



Sumber: BPS Sumatera Utara, SE2016-Lanjutan



<https://sumut.bps.go.id>

PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG



Bagian

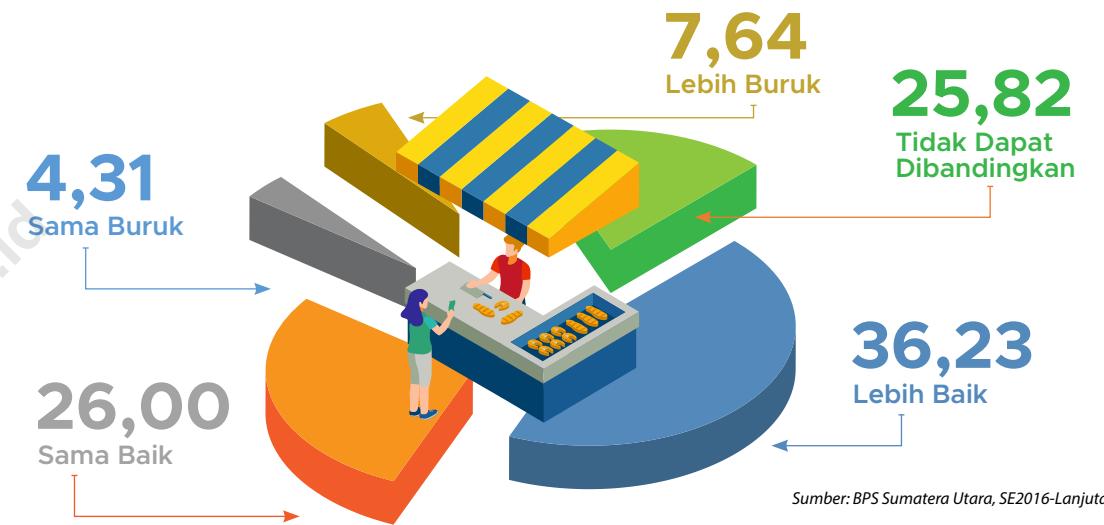
7

R PJMN 2005-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan maupun omset. Pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 36,23 persen. Sebanyak 26,00 persen pengusaha UMK menyatakan sama baiknya, sedangkan yang menyatakan lebih buruk hanya 7,64 persen.

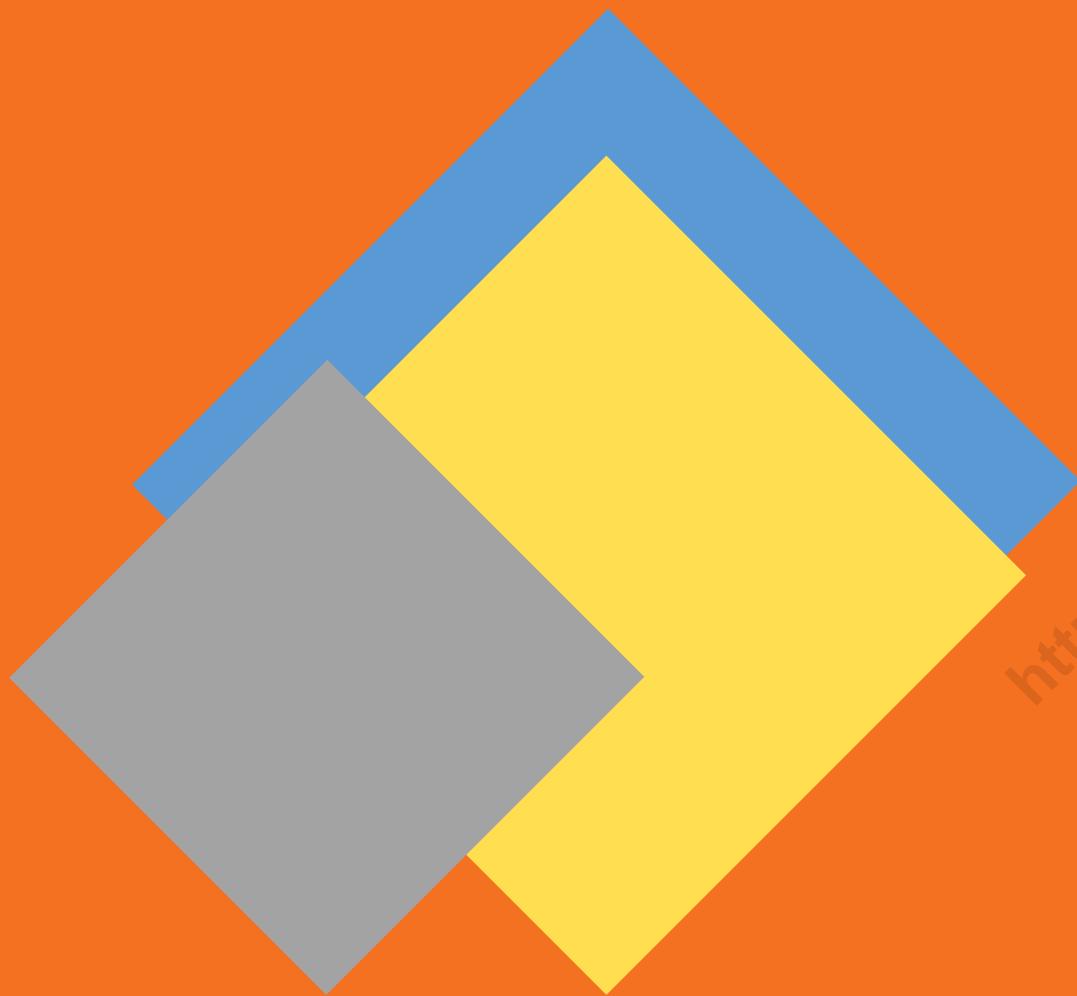
Berdasarkan kategori, prospek Aktivitas Keuangan dan Asuransi (Kategori K) merupakan kategori paling prospek dimasa mendatang dibanding kategori lainnya, sebesar 52,45 persen. Diikuti Pendidikan (Kategori P) sebesar 48,98 persen. Sementara kegiatan Pertambangan dan Penggalian (Kategori B) memiliki prospek paling rendah dimasa mendatang yaitu hanya 24,40 persen.

Pelaku usaha UMK kegiatan Pendidikan (Kategori P) memiliki prospek usaha lebih buruk paling kecil dibandingkan kategori lainnya, yaitu sebesar 48,98 persen. Sedangkan kegiatan Pengangkutan dan Pergudangan (Kategori H) memiliki prospek usaha lebih buruk paling tinggi yaitu mencapai 18,53 persen.

Gambar 7.1.
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Mendatang



PROSPEK
UMK DI MASA
MENDATANG



<https://sumut.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Arahma No. 179 Medan 20123

Telp : (061) 8452343, Fax: (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : bps1200@bps.go.id

